

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ammirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 2012.
- Faisal Salam, Moch., *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Militer*, Bandung, Mandar Maju, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2004.
- Hamzah, Andi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Pitra Utama, 2016.
- S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, Gunung Mulia, 1985.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2016.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1946, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (staatsblad 1934, Nomor 167) Dengan Keadaan Sekarang, Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1948.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembar Negara Nomor 20 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Lembar Negara Nomor 257 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5591.

### C. LAIN-LAIN

Mangalede D., *Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi*, Lex Crime, Vol. VI, No. 6, Agustus 2017.

Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Militer Dalam Lingkungan Pengadilan Militer Yang Dikeluarkan Oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AL/XII/2019.

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22-24 November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung.

Sulistiriyanto H., *Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Perspektif, Vol. XVI, No. 2, Edisi April 2011.

Wawancara Bapak Kapten Chk Irwan Idris, Panitera Muda Pidana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Tanggal 8 April 2021.

Wulandari E. M., *Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum: Rechts Vinding, 2013.